

DAFTAR BACAAN

- Atmosudirjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Asshiddiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Algra, N.E, Mula Hukum, Binacipta, Bandung, 1983
- Basah, Sjachran, Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1992
- Budiharjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Garmedia Pustaka Utama, 2008
- Belinfante, A.D., kort Begrip van het Administratief Recht, Samson Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 1985
- Basah, Sjacran, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara, Alumni Bandung, 1985
- Fatwa, A.M., Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009
- Harahap, Yahya, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989), Pustaka Kartini, Jakarta, 1990
- Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Jakarta, 2006
- Mujahidin, Ahmad, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2007
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-8, PT. RajaGrafindo Persada, Januari, Jakarta, 2013
- Huda, Ni'matul, Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta, Rajawali Perss, 2005
- H.D. van Wijk, Hoofdstukken van Administratief Recht, Utrecht : Uitgeverij Lemma BV., 1995
- HR,Ridwan, “ Hukum Administrasi Negara” Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

- Hadjon, Philipus, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet. Ke-10, GADJAH Mada University Press, Yogyakarta, 2008
- Hdjon, Philipus, Tentang Wewenang, dalam majalah yurudika Fakultas Hukum Unair Nomor 5 dan 6 tahun XII, Sby, 1997
- Kansil, C.S.T, Sistem pemerintahan Indonesia, Jakarta: Bumi aksara, 2003
- Librayanto, Romi, Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, PuKAP, Makassar, 2008,
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Mahmud, Peter, Penelitian Hukum, Penadamedia Group, Jakarta, 2014
- Manan, Bagir, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Penerbit IND-HILL.CO, Jakarta, 1992
- Prins, W.F., Pengantar Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994
Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta, 2005
- Subekti dan Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXXI, PT. Intermasa, Jakarta, 2003
- Syamsudin, Azis, Praktek dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Syahrani, Riduan, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1985
- Tim Visi Yustisia, Kabinet Kerja (Jokowi-JK), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaga-Lembaga Negara Beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-undangan, Cet.1, Visimedia, Jakarta, 2014
- Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988
- Wiyono, R., “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).